

LAPORAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2018



DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Ijin-Nya Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2018 ini disusun berdasarkan hasil realisasi pelaksanaan kegiatan yang merupakan implementasi dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program sebagaimana ditetapkan pada Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Tahun 2018.

Pada Laporan Kinerja ini disajikan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Lingkungan Strategis yang berpengaruh, Renstra Dinas, Indikator Kinerja, Capaian dan Analisis Kinerja, Akuntabilitas Keuangan, Strategi Pemecahan Masalah, Capaian masing-masing Indikator Kegiatan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian dan perikanan Kota Banjarbaru dimasa yang akan datang.

Banjarbaru, 31 Januari 2019
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan Kota Banjarbaru,



HJ. SITI HAMDAN, SP, MT

Pembina Tingkat I
NIP. 19681229 199703 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI.....iii

BAB I..... 4

PENDAHULUAN..... 4

 A. Latar Belakang..... 4

 B. Tugas Pokok dan Fungsi 5

 C. Struktur Organisasi 6

 D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD..... 10

 E. Permasalahan..... 13

 F. Strategi dan Kebijakan 20

BAB II..... 25

PERENCANAAN KINERJA 25

 A. Perjanjian Kinerja..... 25

BAB III..... 28

AKUNTABILITAS KINERJA 28

 A. Capaian Kinerja Organisasi 28

 B. Realisasi Anggaran..... 45

BAB IV 50

PENUTUP..... 50

 A. Kesimpulan 50

 B. Saran Tindak Lanjut..... 50

LAMPIRAN..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang selalu meningkat permintaannya sehingga semua orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya itu. Kebutuhan pangan akan meningkat seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk di dalam suatu wilayah. Ketersediaan pangan sebaiknya jumlahnya mencukupi serat, bermutu baik dan harga dapat dijangkau oleh masyarakat. Pangan diartikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah.

Salah satu komoditas pangan utama yang paling dominan dikelola di setiap daerah di Kalimantan Selatan termasuk di Kota Banjarbaru adalah padi yang nantinya akan diolah menjadi beras sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Kebutuhan pangan pada saat ini dan yang akan datang harus bisa terpenuhi, oleh sebab itu perlu suatu pendekatan baru dalam perkembangan pertanian maupun perikanan, agar kebutuhan pangan yang terus meningkat dapat terpenuhi dikarenakan terus bertambahnya jumlah penduduk yang terus berkembang.

Pembangunan dalam bidang pertanian maupun perikanan pada saat ini dalam rangka pemenuhan pangan dan gizi serta menambah pendapatan masyarakat. Pembangunan sektor pertanian dan perikanan dengan sistem agribisnis diharapkan dapat meningkatkan kuantitas, produktivitas, kualitas, pemasaran dan efisiensi usaha pertanian maupun perikanan, baik yang dikelola secara mandiri maupun kemitraan. Pembangunan pertanian dan perikanan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dilaksanakan melalui berbagai upaya pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru. Walaupun pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari kendala di sektor pertanian maupun perikanan yang juga menjadi isu strategis pada sektor tersebut, diantaranya lajunya pertumbuhan penduduk, konversi lahan pertanian yang masih tinggi, regulasi, kelembagaan dan sumberdaya manusia serta permodalan. Oleh karena itu dengan pemanfaatan pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan dapat mengatasi kendala yang ada di sektor pangan, pertanian maupun perikanan saat ini.

Pada setiap akhir pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan evaluasi kinerja melalui suatu hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) dimana dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui pencapaian kinerja dan

untuk mewujudkan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru sebagai unsur penyelenggara pemerintahan bidang pangan, pertanian dan perikanan di Kota Banjarbaru. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu bagaimana mewujudkan suatu Laporan kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai hasil kinerja suatu organisasi pemerintahan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Kota Banjarbaru, dan berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru

adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah melaksanakan urusan pemerintahan dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Pangan dan Bidang Penyuluhan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan.

b. Fungsi

Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah :

1. Perumusan kebijakan visi, misi, rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan program pemerintah kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja dalam bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang Ketahanan Pangan serta bidang Penyuluhan;
2. Pelaksanaan kebijakan, koordinasi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pertanian dan Perkebunan, Bidang Perikanan, Bidang Peternakan, Bidang Ketahanan Pangan serta Bidang Penyuluhan;
4. Pengambilan keputusan dan kebijakan yang tepat terhadap terhadap permasalahan yang timbul berkaitan dengan tugas, hasil tugas agar tepat sasaran dan tujuan organisasi.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian, Bidang Perkebunan, Bidang Perikanan, Bidang Peternakan dan Bidang Penyuluhan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang Ketahanan Pangan dan bidang Penyuluhan yang merupakan program kerja Dinas Ketahanan Pangan, pertanian dan Perikanan sesuai dengan program pemerintah kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- 2) Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan tugas pada bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan dinas ketahanan pangan pertanian dan perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kota dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan;
- 5) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian dan perkebunan, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan ;
3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :

- a. Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan ;
- b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- c. Seksi Mutu Keamanan Pangan

d. Bidang Pertanian dan Perkebunan, terdiri dari :

- a. Seksi Tanaman Pangan ;

b. Seksi Hortikultura dan Perkebunan ;

e. Bidang Perikanan, terdiri dari :

1. Seksi Budidaya Perikanan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan;
2. Seksi Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan.

f. Bidang Peternakan, terdiri dari :

1. Seksi Produksi, Bina Usaha dan Pengolahan Hasil Peternakan;
2. Seksi Kesehatan Hewan dan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

g. Bidang Penyuluhan, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan SDM Penyuluhan dan Petani ;
2. Seksi Media Penyuluhan dan Kemitraan.

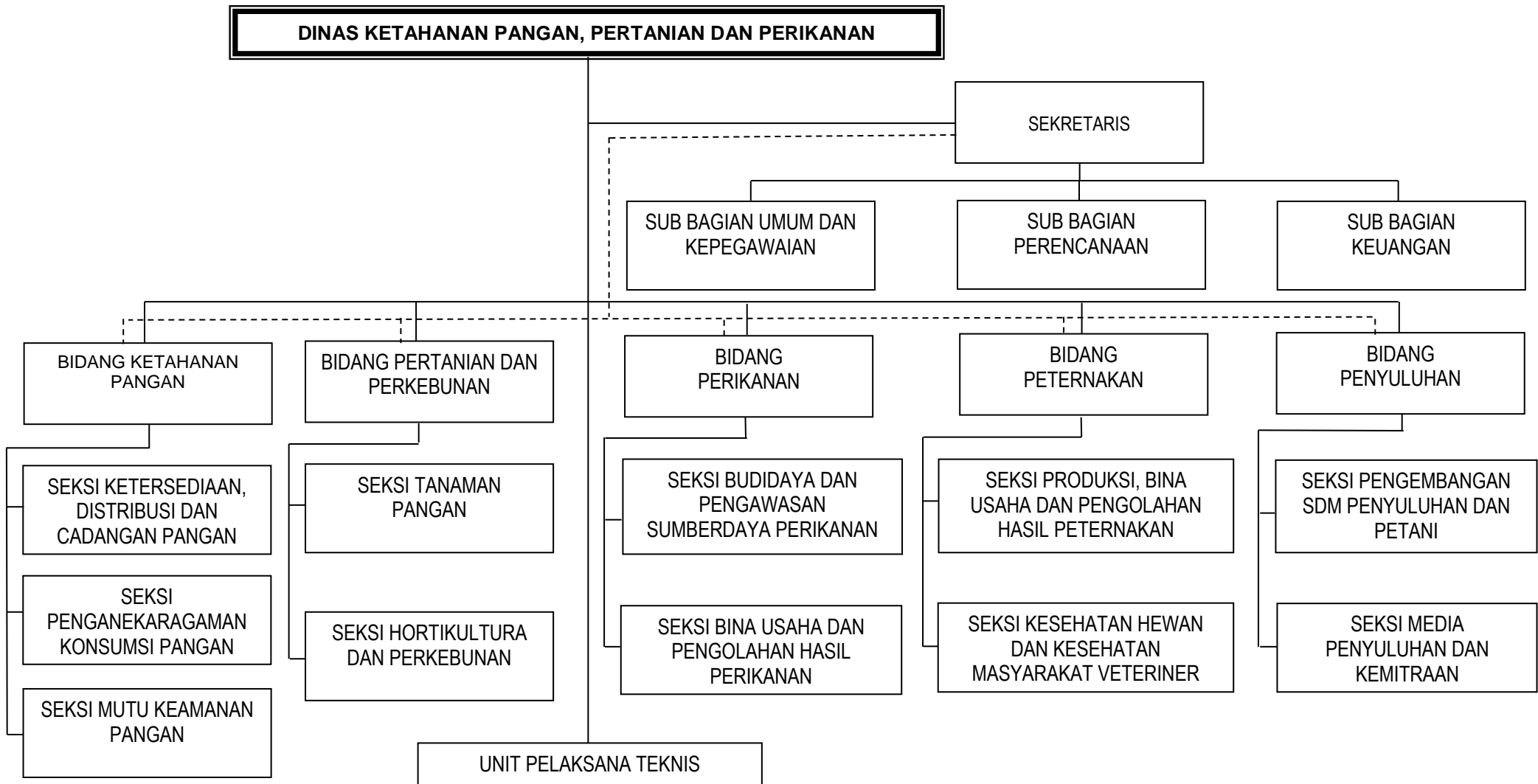
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari ;

1. UPT Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (PPBAT);
2. UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH);
3. UPT BPP Liang Anggang ;
4. UPT BPP Landasan Ulin ;
5. UPT BPP Banjarbaru ;
6. UPT BPP Cempaka ;
7. UPT Balai Pembibitan Ternak Pusat Kesehatan Hewan

i. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dapat dilihat pada bagan tersebut di bawah :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN
KOTA BANJARBARU**



Keterangan : — : Garis Komando - - - - : Garis Koordinasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru sampai dengan tahun 2018 didukung oleh 142 orang personil, yang terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Struktural sebanyak = 73 orang
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Fungsional sebanyak =26 orang
- terdiri dari :
 - 1). JFT Penyuluh = 21 orang
 - Terampil = 1 orang
 - Pelaksana Lanjutan = 1 orang
 - Ahli = 5 orang
 - Pratama = 4 orang
 - Muda = 4 orang
 - Madya = 2 orang
 - Penyelia = 1 orang
 - 2). JFT Analisis Pasar Hasil Pertanian = 2orang
 - 3). JFT Medik Veteriner = 3orang
- c. Pegawai Non PNS sebanyak 43 orang terdiri dari :
 - 1). Pegawai Tidak Tetap (PTT) =3 orang
 - 2). Tenaga Kontrak = 24 orang
 - 3). THL-TB PP = 7 orang
 - 4). Non Register = 9 orang

Tabel. 1.
Keadaan Pegawai

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH		GOLONGAN	JUMLAH		ESELON	JUMLAH	
		Lk	Pr		Lk	Pr		Lk	Pr
1	SD			I/a			non eselon	21	49
2	SLTP	1		I/b			I.a		
3	SLTA	6	4	I/c			I.b		
4	D-I			I/d		1	II.a		
5	D-II			II/a			II.b		1
6	D-III	2	3	II/b	1	1	III.a		1
7	D-IV	2	1	II/c	3	1	III.b	4	
8	S-1	15	46	II/d	3	2	IV.a	6	10
9	S-2	8	11	III/a	2	9	IV.b	3	4
10	S-3			III/b	3	9	V.a		
11	Pendidikan Profesi			III/c	6	21	V.b		
12				III/d	6	13			
13				IV/a	7	7			
14				IV/b	2	2			
15				IV/c					
16				IV/d					
17				IV/e					
	JUMLAH	34	65	JUMLAH	33	66	JUMLAH	34	65

d. Pegawai Pusat/Provinsi Yang Diperbantukan

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1). Pengendali organisme Pengganggu | |
| Tanaman Pangan | =2 orang |
| 2). Penyuluh Perikanan | =4 orang |
| 3). THL-TB Perikanan | =4 orang |
| 4). Pengawas Benih Tanaman | =1 orang |

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Tantangan (*Threat*) yaitu situasi dan faktor-faktor luar bersifat negatif yang dapat mengakibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan tidak dapat atau gagal dalam mencapai visi dan misi meliputi :
 - a Pengelolaan sumberdaya agribisnis dan penanganan daerah rawan pangan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan berkelanjutan;
 - b Pengetahuan dan keterampilan petani, peternak, petani ikan dan pelaku usaha agribisnis Kota Banjarbaru relatif masih sederhana dan mengandalkan kondisi alam;
 - c Permodalan petani pelaku usaha agribisnis Kota Banjarbaru belum memasuki akses perbankan;
 - d Pengolahan hasil komoditi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan dengan memanfaatkan bahan baku dari luar daerah belum diperdayakan secara optimal;
 - e Investor dalam bidang agribisnis belum berkembang.
2. Peluang (*Opportunity*) yaitu situasi dan faktor-faktor luar bersifat positif yang membantu Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mencapai atau mampu melampaui pencapaian dalam mencapai visi dan misi meliputi:

- a Dukungan dan komitmen yang kuat dari Kepala Daerah dan Legislatif dalam pengembangan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan terutama untuk pengolahan hasil (agroindustri);
- b Akses transportasi dan informasi yang memadai untuk berhubungan dengan kabupaten dan kota lainnya;
- c Adanya Lembaga Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi yang berbasis pertanian, peternakan dan perikanan baik negeri maupun swasta Kota Banjarbaru;
- d Permintaan terhadap produk agribisnis cukup tinggi terlebih dengan adanya permintaan terhadap hasil pertanian yang organik;
- e Letak Kota Banjarbaru yang strategis untuk memasarkan produk komoditi agribisnis yang dihasilkan.

Berdasarkan tantangan dan peluang tersebut diatas dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembangunan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Kota Banjarbaru, karena itu dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Kota Banjarbaru yang menjadi ruang lingkup SKPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru tidak terlepas dari Tantangan (*Threats*) dan Peluang (*Opportunities*) yang dihadapi selama tahun 2018 yang kemudian diimplementasikan menjadi visi dan misi, kemudian visi dan misi tersebut dijabarkan menjadi tujuan.

Tujuan tersebut lebih lanjut diinterpretasikan menjadi sasaran. Upaya lebih lanjut untuk mencapai sasaran tersebut maka dibuatlah kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Kota Banjarbaru.

Sehingga dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di Kota Banjarbaru dapat berjalan dengan baik. Kemudian dari program tersebut diimplementasikan menjadi kegiatan sebagai ujung tombak dari Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan memperhatikan ketersediaan dan keterbatasan sumberdaya, baik sumberdaya alamnya sendiri maupun sumberdaya manusianya sebagai pelaksana.

E. Permasalahan

Pembangunan periode 2016-2021 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya (2011-2015). Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan, diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode pembangunan jangka waktu lima tahun ke depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pembangunan bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta penanganan ketahanan pangan yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta ketahanan pangan di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2016-2021, mencakup aspek seperti: kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; kepemilikan lahan; sistem perbenihan dan perbibitan; akses petani terhadap permodalan kelembagaan petani dan penyuluh; keterpaduan antar sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. Secara lebih lengkap, permasalahan mendasar tersebut di atas diuraikan sebagai berikut :

1. Pertambahan Penduduk

Seiring dengan meningkatnya pertambahan penduduk baik karena kelahiran atau adanya perpindahan penduduk, menyebabkan terjadi kenaikan permintaan atas produk pangan. Tingginya kebutuhan akan bahan pangan dan produk pangan menyebabkan permintaan semakin tinggi tetapi tidak diimbangi dengan persediaan bahan pangan dan produk pangan yang berdampak kepada terjadinya kerawanan pangan.

Ditambah lagi pola pangan yang sama terutama kebutuhan akan beras yang semakin tinggi menyebabkan tingginya permintaan beras di masyarakat, hal tersebut tentunya memerlukan diversifikasi akan bahan pangan dan produk pangan.

2. Lahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan terkait dengan lahan adalah sebagai berikut:

- a. Konversi lahan yang tidak terkendali

Keberlanjutan sektor pertanian/perkebunan, perikanan dan kehutanan dihadapkan pada ancaman serius, yakni luas lahan pertanian/perkebunan, perikanan dan kehutanan yang terus menyusut akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif. Kini lahan sawah dan perkebunan karet lebih menguntungkan untuk dijadikan sebagai areal pembangunan perumahan/pemukiman, pabrik, atau infrastruktur untuk aktivitas industri lainnya daripada pertanian/perkebunan, perikanan dan kehutanan.

b. Penurunan kualitas lahan

Sebagian besar lahan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan yang ada di Kota Banjarbaru sudah mengalami penurunan kualitas, bahkan ada yang termasuk kategori kritis. Hal ini akibat pemakaian bahan kimia anorganik berlebihan. Pemakaian pupuk kimia anorganik berlebihan menyebabkan struktur tanah menjadi padat dan daya dukung tanah bagi pertumbuhan tanaman menurun. Disamping itu, produk-produk kimiawi tersebut, selain mengandung bahan yang diperlukan tanaman, dapat juga mengandung bahan kimiawi yang berbahaya (seperti senyawa klorin dan merkuri) bagi lahan dan makhluk hidup. Bila kondisi ini dibiarkan, maka dapat menimbulkan kerusakan lahan semakin luas dan berakibat penurunan produktivitas lahan dan tanaman.

c. Rata-rata kepemilikan lahan yang sempit

Luas penguasaan lahan petani semakin sempit sehingga menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini menyulitkan upaya peningkatan kesejahteraan petani, penyempitan penguasaan lahan mengakibatkan tidak efisien dalam berusahatani.

d. Ketidakpastian status kepemilikan lahan

Kondisi kepemilikan lahan yang sering bermasalah antara lain disebabkan oleh: (1) meningkatnya konversi lahan pertanian/perkebunan untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum, (2) terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, dan (3) terjadinya penjualan tanah sawah dan lahan perkebunan karet. Status penguasaan lahan oleh petani sebagian besar belum bersertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan memperoleh kredit perbankan. Pesatnya laju pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya lahan telah membawa implikasi

terhadap pelanggaran tata ruang. Otonomi daerah juga membawa akses peningkatan pemanfaatan lahan multi sektoral. Kondisi tersebut pada kenyataannya sulit diimbangi dengan penyediaan lahan, baik melalui pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan yang ada maupun pembukaan lahan baru.

3. Infrastruktur

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini sangat memprihatinkan adalah sistem pengairan atau jaringan irigasi. Ketiadaan waduk di Banjarbaru membuat sistem pengairan mengandalkan pada kondisi alam. Selain itu, prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini secara memadai untuk dapat meningkatkan produksi dan menekan biaya tinggi yang timbul akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian tanaman pangan dan perkebunan.

Disamping itu, masalah transportasi distribusi ternak belum optimal, yaitu tata niaga daging sapi domestik masih mengandalkan pada pengiriman sapi hidup dan masih memiliki hambatan, sehingga belum efisien. Penyebab inefisiensi diantaranya: belum memadainya jumlah dan kapasitas alat angkut (truk dan kapal) dan minimnya kualitas sarana angkutan baik truk maupun kapal yang digunakan. Belum semua pelabuhan memiliki holding ground untuk tempat pengumpulan ternak dan pemeriksaan karantina. Kondisi ini diperburuk lagi dengan adanya retribusi selama proses pengangkutan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke daerah tujuan.

4. Sarana Produksi

Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Belum berkembangnya usaha penangkaran

benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi mengakibatkan harga benih/bibit menjadi mahal, bahkan mengakibatkan banyak beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat yang pada akhirnya sangat merugikan petani.

Benih merupakan sarana penting bagi usaha di bidang pertanian, apabila benih/ bibit yang tersedia tidak baik atau palsu maka hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, pengadaan benih belum sesuai dengan musim tanam, biasanya benih sampai dilokasi setelah musim tanam dan kadangkala benih sudah kadaluarsa. Kondisi dikarenakan infrastruktur dan sistem perbenihan sulit berkembang karena memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak banyak swasta yang mau menanamkan investasi untuk usaha perbenihan/perbibitan. Di lain pihak, pemerintah kurang berdaya menangani perbenihan.

Dalam sistem perbenihan didukung oleh beberapa subsistem yang terdiri dari: subsistem pengembangan varietas untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan selera masyarakat; subsistem produksi dan distribusi benih; subsistem perbaikan mutu melalui sertifikasi dan pelabelan; dan subsistem kelembagaan dan peningkatan SDM. Keberhasilan dalam menggerakkan seluruh komponen sangat dipengaruhi oleh komponen pendukung antara lain lembaga perbenihan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kebijakan pemerintah, sistem informasi, dan kesadaran konsumen dalam menggunakan benih bermutu.

Sistem perbibitan diperlukan untuk menjamin ketersediaan bibit ternak yang memenuhi kebutuhan dalam hal jumlah, standar mutu, syarat kesehatan, syarat keamanan hayati, serta terjaga keberlanjutannya yang dapat menjamin terselenggaranya usaha budidaya peternakan. Kelembagaan perbibitan ini untuk memfasilitasi tersedianya benih dan bibit ternak sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas benih dan bibit ternak serta pemanfaatan sumberdaya genetik ternak secara berkelanjutan.

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Sistem distribusi yang belum baik serta margin harga dunia yang relatif tinggi dibandingkan dengan harga pasar domestik mengakibatkan banyak terjadinya praktek penyelundupan pupuk bersubsidi. Dengan

keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman/hewan yang ramah lingkungan.

5. Regulasi

Pengembangan sektor pertanian/perkebunan yang bersandar pada pengelolaan sumberdaya alam saat ini dihadapkan dengan berbagai macam regulasi yang terkait dengan lingkungan. Selain itu, untuk mencapai sasaran yang diharapkan perlu regulasi dan kelembagaan untuk mensinergikan upaya yang saling mendukung untuk pencapaian sasaran dimaksud. Oleh karena itu, regulasi dan kelembagaan dalam pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan mutlak diperlukan, sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan dan peraturan perundangan dari masing-masing instansi. Regulasi juga diperlukan untuk melindungi pengembangan komoditas usaha di sektor pertanian/perkebunan, perikanan dan ketahanan pangan. Pengembangan pertanian/perkebunan dan perikanan memerlukan dukungan agar tercipta iklim yang kondusif melalui formulasi kebijakan.

Dalam era globalisasi dewasa ini, persaingan pasar antar komoditas pangan semakin ketat. Komoditas impor sering membanjiri pasar dalam negeri dengan harga yang lebih murah. Hal ini dapat menghancurkan pengembangan pangan domestik. Produk impor lebih murah dari produk dalam negeri, karena pemerintah negara-negara eksportir melindungi para petaninya secara baik dengan berbagai cara, sehingga mampu menghasilkan kualitas yang lebih baik serta kontinuitas pasokan yang lebih terjamin.

Pemerintah daerah berupaya untuk mendorong program peningkatan produksi dengan empat strategi a) Peningkatan produktivitas, b) perluasan areal tanam, c) pengamanan produksi dari

gangguan organisme pengganggu tanaman, dampak perubahan iklim dan kehilangan hasil pada saat panen dan pascapanen, dan d) perbaikan kelembagaan dan pembiayaan.

6. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Kelembagaan dan sumberdaya manusia merupakan dua hal yang saling terkait dan masih menjadi permasalahan dalam proses pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. Beberapa kondisi kelembagaan dan sumberdaya manusia saat ini secara umum, sebagai berikut:

- a. Kelembagaan petani, peternak dan petani ikan yang belum mempunyai posisi yang kuat

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat sosial budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan peluang akses terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Di sisi lain, kelembagaan ekonomi petani, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan: a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; g.

meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

b. Keterbatasan Petani Dalam Pemanfaatan Teknologi

Dari sisi sumberdaya manusia, masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian, karena mereka yang berpendidikan rendah pada umumnya adalah petani yang tinggal di daerah pedesaan. Kondisi ini juga semakin diperparah dengan kurangnya pendampingan penyuluhan pertanian. Di sisi lain, bagi mereka yang telah mengenyam pendidikan formal tingkat menengah dan tinggi, mereka kurang tertarik bekerja dan berusaha di pertanian, sehingga mengakibatkan tingginya urbanisasi ke perkotaan.

c. Menurunnya Minat Generasi Muda

Fakta dan pandangan bahwa pertanian sebagai salah satu sektor yang antara lain kurang menjanjikan bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan hidup, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, lahan pertanian yang semakin berkurang, sangat menentukan terhadap minat generasi muda untuk memilih pertanian sebagai masa depannya. Rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian ini menyebabkan senjang regenerasi di sektor pertanian. Bidang pertanian sebagai pemasok bahan pangan bagi manusia dimungkinkan tidak akan mengalami perkembangan, dan akan berimbas pada menurunnya jumlah bahan pangan yang dihasilkan.

Secara umum, sektor pertanian belum mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik bagi pendapatan, kesejahteraan serta bagi pengembangan karir. Hal ini menjadi alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanian menjadi sangat terbatas dan sulit bagi mereka untuk menekuninya.

Tantangan ke depan adalah bagaimana mengubah pola pikir generasi muda kita terhadap pertanian, bahwa masih banyak potensi pertanian yang masih belum dimanfaatkan secara optimal.

7. Permodalan

Permodalan petani merupakan faktor yang mendukung keberhasilan pengembangan usahatani. Berbagai upaya telah

dilakukan pemerintah dengan mengembangkan skema kredit dengan subsidi suku bunga sehingga suku bunga beban petani lebih rendah. Namun demikian skema kredit tersebut belum mampu mengatasi permodalan petani dan dukungan perbankan belum memberikan kontribusi yang optimal bagi petani.

Hal ini disebabkan antara lain sumber dana sepenuhnya dari bank dan risiko ditanggung bank, oleh karena itu perbankan menerapkan prudential perbankan. Dampak dari penerapan prudential perbankan dirasakan petani seperti sulitnya akses permodalan, persyaratan yang dianggap rumit dan waktu yang lama, masih diperlukan jaminan tambahan yang memberatkan petani berupa sertifikat lahan, terbatasnya sosialisasi dan informasi keberadaan skema kredit serta terbatasnya pendampingan dan pengawalan petani yang membutuhkan permodalan dari perbankan.

Kondisi petani secara umum memiliki lahan sempit, skala usaha kecil dan letaknya yang menyebar dan lebih banyak sebagai buruh tani sehingga lebih mudah dilayani oleh pelepas uang/sumber modal non formal meskipun suku bunga tinggi tetapi waktu perolehannya lebih cepat.

Dengan terbatasnya pembinaan, pengawalan dan pendampingan bagi petani yang mengajukan kredit kepada perbankan untuk modal usaha tani serta tingkat kemauan membayar kembali kredit rendah merupakan salah satu faktor penghambat perbankan dalam menyalurkan kredit kepada petani.

F. Strategi dan Kebijakan

a. Visi

“MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DAN AGRIBISNIS YANG BERKARAKTER”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa terwujudnya ketahanan pangan dan agribisnis yang berkarakter adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya suatu kondisi ketersediaan pangan yang layak dikonsumsi dalam jumlah yang cukup pada tingkat individu, rumah tangga dan daerah baik dari segi mutu, beragam dan berimbang, merata, murah, aman, halal dan terjangkau oleh seluruh masyarakat

dan mampu menggali potensi sumber pangan lokal sebagai penyedia pangan alternatif yang berkualitas dan berkelanjutan.

2. Terwujudnya agribisnis yang produktif, efisien, berdaya saing global dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu menjamin ketersediaan produk agribisnis yang mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kelangsungan yang akan datang.

b. Misi

Penjelasan Misi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGANEKARAGAMAN PANGAN BERBASIS POTENSI DAN KEARIFAN LOKAL

Terpenuhinya tersediaan pangan secara cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya; aman; merata; dan terjangkau bagi setiap individu atau rumah tangga melalui diversifikasi pangan yang berbasis pada Potensi dan Kearifan Lokal. Dengan pengertian tersebut, mewujudkan ketahanan pangan dapat lebih dipahami sebagai berikut:

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan adalah sebagai berikut :

- a. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.
- b. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama berdasarkan kehalalannya.
- c. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan yang harus tersedia setiap saat dan merata di setiap wilayah.

- d. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh oleh individu atau rumah tangga dengan harga yang terjangkau.
- e. Diversifikasi pangan merupakan proses pemanfaatan dan pengembangan bahan pangan yang beraneka ragam terutama ada yang ada di daerah sehingga penyediaan pangan tersebut dapat semakin beragam.

2. **MENGEMBANGKAN AGRIBISNIS YANG EFISIEN, TANGGUH, BERDAYA SAING GLOBAL, BERKELANJUTAN, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN MEMBERIKAN NILAI TAMBAH**

Sistim pengembangan usaha pertanian, perkebuanan, peternakan dan perikanan menuju kepada suatu usaha agribisnis yang efisien, tangguh, berdaya saing global, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan memberikan nilai tambah sehingga mampu membuka peluang usaha dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pengembangan agribisnis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dengan sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat dan swasta selaku pelaku usaha agribisnis dan pemerintah daerah sebagai pembuat regulasi, secara bersama-sama menggunakan potensi yang dimiliki untuk memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Produk agroindustri dengan cara memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan secara alami dan mandiri.
- c. Kemampuan suatu negara untuk berinovasi dalam rangka mencapai, atau mempertahankan posisi yang menguntungkan dibandingkan dengan negara lain dalam sejumlah sektor sektor kuncinya
- d. Sistem terintegrasi antara praktik produksi tanaman dan hewan dalam sebuah lokasi dan dalam jangka panjang
- e. Pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

- f. Pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi.

c. Tujuan dan Sasaran

a) Tujuan

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru mendukung tujuan pada RPJMD meliputi :

- Meningkatnya ketahanan pangan daerah.

b) Sasaran

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru turut mendukung tercapainya sasaran yang tertuang dalam RPJMD seperti :

1. Meningkatnya produksi pangan;
2. Peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya petani.

c) Strategi

Strategi Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru, yaitu :

1. Memanfaatkan potensi dari keragaman sumberdaya lokal untuk peningkatan ketersediaan pangan, dengan memanfaatkan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan,
2. Mendorong masyarakat untuk mau dan mampu dalam mengkonsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan cita rasa dan citra pangan khas Banjar, serta pengembangan produk dan mutu produk pangan bergizi,
3. Mengembangkan perdagangan pangan regional dan antar daerah, sehingga menjamin pasokan pangan keseluruhan wilayah dan harus terjangkau oleh masyarakat,
4. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia pelaku agribisnis baik aparatur, petani maupun pelaku usaha.

5. Meningkatkan pengembangan teknologi dan sistem dalam usaha agribisnis yang mampu memberikan nilai tambah usaha tersebut.
6. Mempertahankan dan memelihara kesuburan tanah, sumber air dan kelestarian fungsi ekosistem lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan usaha agribisnis yang berkelanjutan.
7. Mendorong peningkatan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mewujudkan pembangunan usaha agribisnis yang berorientasi kemandirian masyarakat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

a. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. SITI HAMDAH, SP, MT

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. NADJMI ADHANI

Jabatan : WALIKOTA BANJARBARU

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
WALIKOTA BANJARBARU

H. NADJMI ADHANI

Banjarbaru, 2018
Pihak Pertama,
Kepala Dinas
Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan Kota Banjarbaru

HJ. SITI HAMDAH, SP, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19681229 199703 2 003

Tabel. 2
Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Produksi Pangan	1. Peningkatan Luas Tanam (ha)	1.932 ha
		2. Tingkat Kenaikan Produksi Ternak (%)	1,94% (2.659.793 ekor)
		3. Tingkat kenaikan Produksi Ikan (%)	4,97% (6.179,23 ton)
2.	Peningkatan Pola Konsumsi Pangan masyarakat	Score PPH Konsumsi	91,2
3.	Meningkatnya Kualitas Sumberdata Petani	Persentase Kelembagaan Petani Yang Meningkat Kapasitasnya	40%

	Program	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.324.911.900
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 649.797.400
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 63.641.000
4	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp 413.656.230
5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Rp 640.187.360
6	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Rp 1.285.351.200
7	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Rp 48.031.000
8	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp 144.796.400
9	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp 137.801.400
10	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp 540.641.800
11	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Rp 181.221.864
JUMLAH		Rp 5.430.037.554

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru memiliki tanggungjawab dalam menggunakan sumber daya secara efisien, ekonomis, dan efektif untuk mencapai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban pejabat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi pada pengelolaan sumber daya yang tersedia dalam menjalankan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Selanjutnya media akuntabilitas merupakan media pertanggungjawaban yang dapat menjadi alat oleh pihak yang memberi kewenangan untuk menilai kinerja pejabat pemerintah.

A. Capaian Kinerja Organisasi

a. Kerangka Pengukuran Kinerja

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan syarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Kelompok indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran bervariasi tergantung jenis indikator sasarannya. Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan adalah input, output dan outcome. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan. Target kinerja merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi dan merupakan suatu rencana yang dibuat pada awal tahun anggaran, dan selanjutnya pada akhir tahun akan dibandingkan dengan realisasinya yang merupakan pencapaian dari hasil pelaksanaan kinerja kegiatan, sehingga diketahui celah kinerja. Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidakberhasilan jika ada maupun keberhasilan yang dicapai, dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang.

Pengukuran Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Hasil Pengukuran kemudian dikategorisasikan ke dalam 5 (lima) kategori pencapaian kinerja sebagai berikut :

Tabel.3
Pengukuran Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang
4.	51 % ≤ 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

b. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Analisis atas tingkat pencapaian kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru untuk masing-masing indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.4
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Kriteria
1.	Meningkatnya Produksi Pangan	1. Peningkatan Luas Tanam (ha)	1.932 ha	1.897 ha	98,19 %	Sangat tinggi
		2. Tingkat Kenaikan Produksi Ternak (%)	1,94% (2.659.793 ekor)	1,95% (2.660.399 ekor)	100,5%	Sangat tinggi
		3. Tingkat kenaikan	4,97% (6.179,23	5,49 %	105,3 %	Sangat

		Produksi Ikan (%)	ton)	(6.506,34 ton)		tinggi
2.	Peningkatan Pola Konsumsi Pangan masyarakat	Score PPH Konsumsi	91,2	89,2	97,81%	Sangat tinggi
3.	Meningkatnya Kualitas Sumberdata Petani	Persentase Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan Kapasitasnya	40%	48%	120%	Sangat Tinggi

c. Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru. Adapun evaluasi kinerja untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Produksi Pangan

Sasaran tersebut menjadi sangat penting karena berhubungan dengan produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan. Untuk mengukur Sasaran ini digunakan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama seperti pada Tabel berikut :

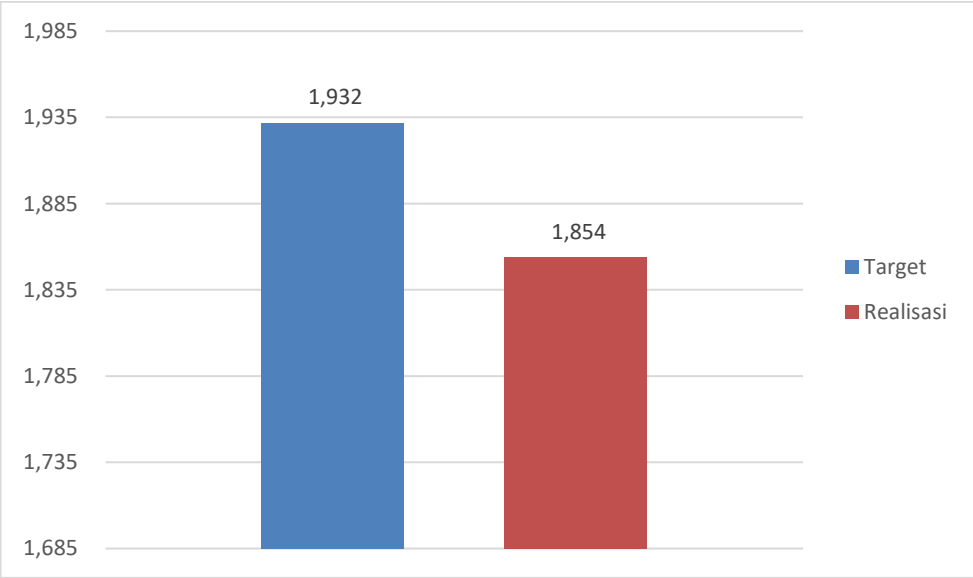
Tabel. 5.
Capaian Kinerja Meningkatnya Produksi Pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Prosentase Kinerja Tahun 2018 $8 = 7/6 \times 100$	Target Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Produksi Pangan	1. Peningkatan Luas Tanam (ha)	Ha	1.884 ha	1.932 ha	1.854 ha	95,96 %	2.094 ha
		2.Tingkat Kenaikan Produksi Ternak (%)	%	1,91% (2.609.122 ekor)	1,94% (2.659.793 ekor)	1,95% (2.660.399 ekor)	100,5%	2,045 (2.823.400 ekor)
		3.Tingkat kenaikan Produksi Ikan (%)	%	5,57% (6.600 ton)	4,97% (6.179,23 ton)	5,49 % (6.506,34 ton)	105,3 %	5,03 % (7.154,63 ton)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja untuk sasaran Meningkatnya Produksi Pangan masing-masing indikator tahun 2018 terhadap target sebagian besar telah terlampaui, namun ada satu target kinerja yang tidak tercapai yaitu target peningkatan luas tanam (dengan capaian 98,19 %). Untuk capaian kinerja nya pada masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Luas Tanam (Ha)di tahun 2018 ditargetkan 1.932 Ha dan terealisasi 1.854 Ha atau 95,96 %, dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**.

Diagram 1. Indikator Kinerja Peningkatan Luas Tanam (Ha)



Peningkatan Luas Tanam merupakan salah satu upaya meningkatkan produksi padi di Kota Banjarbaru selain menambah intensitas tanam. Pada Tahun 2018 peningkatan luas tanam belum mencapai target seperti yang telah ditentukan. Tidak tercapainya target peningkatan luas tanam ini karena adanya gagal tanam pada sebagian lahan petani, adanya poso yang disebabkan serangan hama dan penyakit, iklim yang tidak menentu (ekstrem) serta adanya alih fungsi lahan yang cukup tinggi, sehingga berpengaruh pada luas tanam. Data luas tanam di kota banjarbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6

Data Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Kota Banjarbaru Tahun 2018

No.	Jenis Tanaman	Luas Tanam (Ha)	Rusak (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)
1	2	3	4	5	6	7
01.	Padi Sawah	1.797	37,35	1.427	5.198,6	36,43
02.	Padi Ladang	57	-	6	18,5	30,77
03.	Padi sawah + ladang	1.854	37,35	1.433	5.211,8	36,37
04.	Jagung	252	-	261	913,5	35,00

05.	Kacang Tanah	3	-	4	2,6	6,40
06.	Ubi Kayu	24	-	39	1.041,6	267,07
07.	Ubi Jalar	17	-	20	457,8	228,90

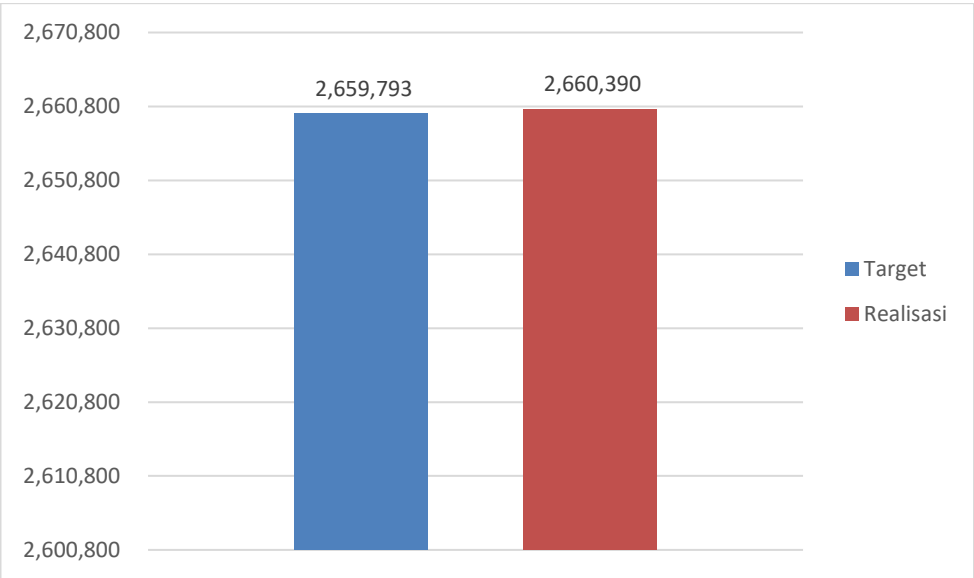
Dari tabel diatas terlihat realisasi jumlah luas tanam di Kota Banjarbaru khususnya untuk tanaman padi yang terdiri dari padi sawah dan padi ladang berjumlah 1.854 Ha. Realisasi Luas tanam tersebut belum mencapai target yang telah ditentukan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya gagal tanam pada sebagian lahan petani, adanya poso yang disebabkan serangan hama dan penyakit, iklim yang tidak menentu (ekstrem) serta adanya alih fungsi lahan yang cukup tinggi, sehingga berpengaruh pada luas tanam.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel 5 diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indicator “Peningkatan Luas Tanam Tahun 2018 adalah 1.854 ha, namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 sebesar 2.094 ha peningkatan luas tanam baru tercapai 88,54 %.

- b. Tingkat kenaikan Produksi Ternak di tahun 2018 ditargetkan 1,94 %(2.659.793 ekor) ekor dan terealisasi 1,95 % (2.660.399 ekor) atau 100,5 %, dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**.

Diagram 2. Tingkat Kenaikan Produksi Ternak (%)



Kenaikan tingkat persentase populasi ternak pada tahun 2018 sebesar 100,5% dimana capaian ini telah melampaui target yang telah ditetapkan. Tercapainya target ini antara lain disebabkan adanya penyebaran ternak yang cukup banyak, baik dari anggaran APBD Kota Banjarbaru maupun APBN. Selain itu adanya program Kementerian Pertanian khususnya Dirjen Peternakan yaitu

Program UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) sehingga petugas Inseminasi mendapat target yang cukup tinggi untuk IB (Inseminasi Buatan). Untuk data penyebaran ternak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7
Data Penyebaran Ternak Se Kota Banjarbaru

No.	Jenis Ternak	Kecamatan					Jumlah
		Bjb Utara	Bjb Selatan	Cempaka	LU	LA	
1	Sapi	220	85	503	1186	351	2.345
2	Kambing	103	88	233	1.027	897	2.348
3	Ayam Ras	789.643	27.953	137.128	1.543.400	51.876	2.550.000
4	Ayam kampung (Ayam Buras)	1.995	1597	19.965	16.393	14.278	54.228
5	Itik	3.581	19.774	1.570	13.441	12.634	51.000

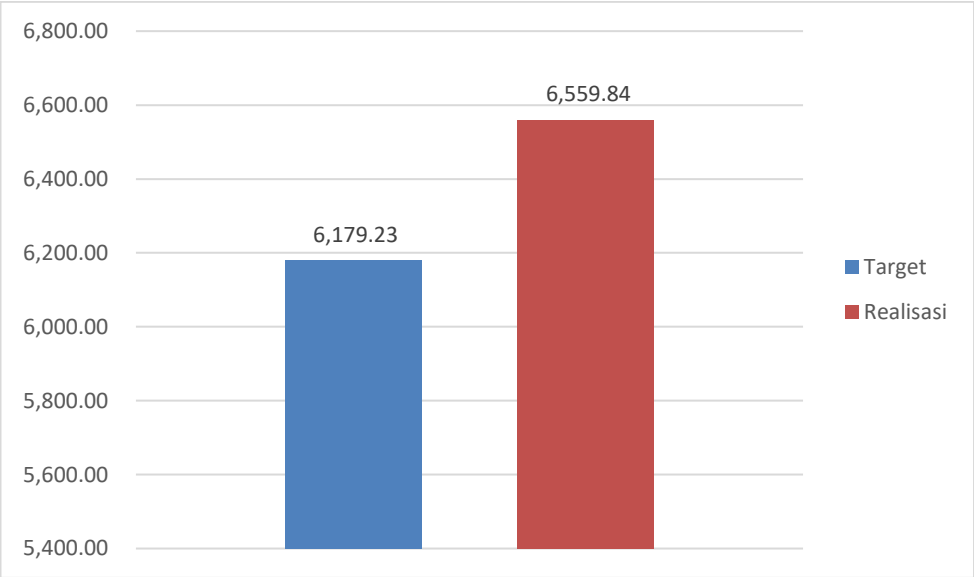
Dari tabel tersebut di atas secara umum terlihat, jenis peternakan di Banjarbaru hampir sama dengan daerah lain meliputi peternakan hewan besar, kecil dan unggas, namun dalam perkembangannya masih mengalami berbagai kendala dan tantangan. Banjarbaru merupakan daerah perkotaan dan lebih dominan permukiman, sehingga lahan untuk pertanian khususnya bidang peternakan mengalami permasalahan antara lahan ternak dengan pemukiman yang semakin berkembang. Hal ini merupakan tantangan terbesar untuk Bidang Peternakan untuk memberi inovasi ke petani ternak agar tidak memberi dampak kepada lingkungan sekitar. Sebaran ternak terbanyak di Kecamatan Cempaka, Landasan Ulin dan Liang Anggang mengingat ketiga Kecamatan tersebut merupakan daerah pertanian dan masyarakatnya masih mempunyai minat cukup tinggi untuk usaha di bidang peternakan.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel 5 diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indicator “Tingkat kenaikan Produksi Ternak” Tahun 2018 adalah 1,95% (2.660.399 ekor), namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 sebesar 2,04% (2.823.000 ekor) baru tercapai 95,59 %

- c. Tingkat Kenaikan Produksi Ikan di tahun 2018 ditargetkan sebesar 4,97% (6.179,23 ton) dan terealisasi sebesar 5,49 % (6.559,84 ton) atau 105,3% dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**.

Diagram 3. Tingkat Kenaikan Produksi Ikan (%)



Produksi Ikan terdiri dari produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Tercapainya target tersebut karena bidang perikanan selain mendapatkan dukungan dana APBD Kota Banjarbaru, juga mendapat dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan berupa bantuan benih ikan lele, nila, paket bantuan Unit Perbenihan Rakyat (UPR), pakan dan bantuan sarana prasarana perikanan yang langsung diserahkan kepada Unit perbenihan rakyat dan kelompok-kelompok budidaya ikan yang tersebar di kota Banjarbaru. Untuk data jumlah produksi perikanan budidaya pembesaran ikan konsumsi dan produksi Tangkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8

Laporan Statistik Produksi Perikanan Budidaya Pembesaran Ikan Konsumsi

No	Jenis Ikan	Jumlah (Ton)	Jenis Budidaya		
			Kolam	Keramba	Jaring Apung
	JUMLAH	6.446,50	5.695,00	159,50	592,00
1.	Ikan Mas	244,5	180,0	64,5	-
2.	Nila	2.597,0	1.910,0	95,0	592,0
3.	Gurami	1.085,0	1.085,0	-	-
4.	Patin	69,0	69,0	-	-
5.	Lele	1.860,0	1.860,0	-	-
6.	Betok	75,0	75,0	-	-
7.	Bawal Tawar	516,0	516,0	-	-
Jumlah Produksi Tangkap		59,84 Ton			

Dari tabel diatas terlihat jumlah produksi perikanan pada tahun 2018 yang terdiri dari perikanan budidaya sebesar 6.446,50 ton dan perikanan tangkap sebesar 59,84 ton sehingga jumlah keseluruhan produksi perikanan di kota Banjarbaru Tahun 2018 sebesar 6.559,84 ton. Jumlah produksi perikanan budidaya terbesar adalah komoditas ikan Nila, Lele dan Gurami yang tersebar diseluruh wilayah kota banjarbaru, baik budidaya kolam, karamba dan jaring apung. Untuk produksi perikanan tangkap didapat dari danau –danau bekas galian tambang, sungai serta perairan rawa yang ada di kota Banjarbaru.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel 5 diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indicator “Tingkat kenaikan Produksi Ikan” Tahun 2018 adalah 6.506,34 ton, namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 sebesar 7,154,63 ton)baru tercapai 90,94 %

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang mendukung untuk sasaran Meningkatnya Produksi Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah :

1) Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

- a) Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan
- b) Pengembangan Sarana dan Prasarana pertanian (DAK)
- c) Pengembangan Upaya Khusus Padi, Jagung dan Kedelai
- d) Pengembangan Sarana dan Prasarana Hortikultura
- e) Pengembangan Intensifikasi Tanaman Hortikultura
- f) Pengembangan Benih/Bibit Unggul Hortikultura
- g) Pengembangan Usaha Perkebunan

2) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

- a) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak
- b) Pendistribusian Ternak kepada Masyarakat
- c) Pengembangan Agribisnis Peternakan
- d) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Melalui Pembibitan dan Penetasan

3) Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak

- e) Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- f) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis
- g) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Masyarakat
- h) Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Kesehatan Ternak Milik

Masyarakat

4) Pengembangan Budidaya Perikanan

- a) Pengembangan Sarana dan Prasaranan Perbenihan
- b) Pembinaan dan Pengawasan Kelestarian Sumber Daya Perikanan
- c) Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar

5) Program Optimasiasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

- a) Peningkatan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
- b) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Benih Ikan

Sasaran Strategis 2

Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat

Sasaran tersebut menjadi sangat penting karena tertuang dalam SPM dan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan SPM Ketahanan pangan. Untuk mengukur Sasaran ini digunakan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama seperti pada Tabel berikut :

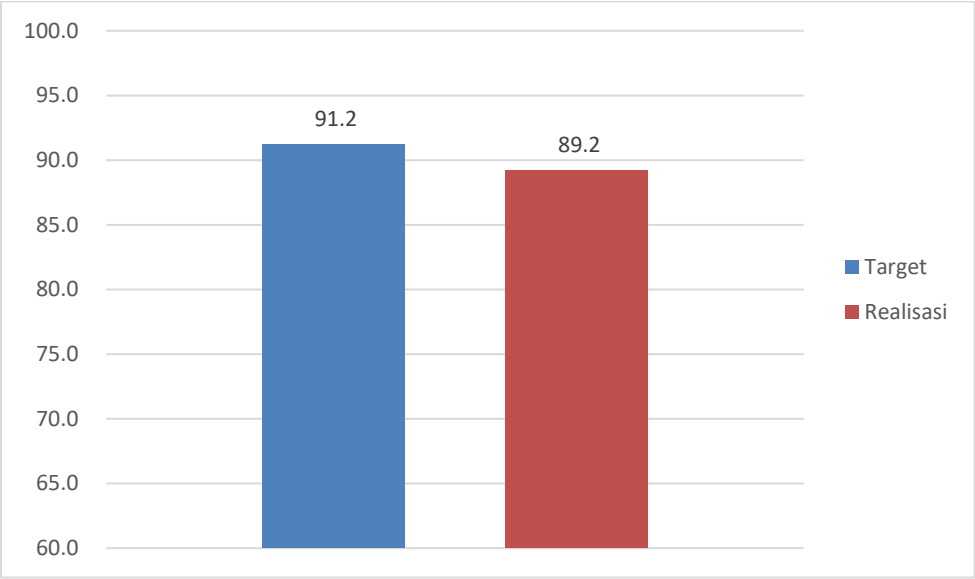
Tabel. 9
Capaian Kinerja Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Prosentase Kinerja Tahun 2018 $7 = 7/6 \times 100$	Target Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Score PPH Konsumsi	Scoring	90,80	91,20	89,20	97,81	91,2

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi kinerja untuk sasaran Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat pada indikator Score PPH Konsumsi tahun 2018 terhadap target tidak tercapai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap capaian PPH ini diantaranya berkurangnya jumlah anggota rumah tangga (meninggal atau pindah) yang menjadi sampel, faktor pendapatan dan ekonomi keluarga serta faktor tingkat pendidikan dan pengetahuan dari masyarakat. Untuk capaian kinerja nya pada indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Score PPH Konsumsi di tahun 2018 ditargetkan sebesar 91,2 dan terealisasi 89,2 atau sebesar 97,81 %, dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**.

Diagram 4. Score PPH Konsumsi



PPH diartikan sebagai susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas proporsi sumbangan energinya terhadap total energi yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan dan gizi penduduk, baik dalam jumlah, kualitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan segi-segi sosial, ekonomi, budaya, agama dan citarasa. Score PPH difokuskan pada pendekatan PPH tingkat konsumsi rumah tangga. Data yang dihasilkan bersifat terbatas pada kelompok pangan, namun demikian secara umum dapat memberikan gambaran situasi pola dan keanekaragaman konsumsi pangan rumah tangga di daerah ini dalam suatu kurun waktu tertentu. Skor PPH Kota Banjarbaru tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10
SKOR POLA PANGAN HARAPAN AKTUAL TAHUN 2017
KOTA BANJARBARU

No.	Kelompok pangan	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kalori	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1.	Padi-padian	1083,9	57,4	54,2	0,5	28,7	27,1	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	23,2	1,2	1,2	0,5	0,6	0,6	2,5	0,6
3.	Pangan Hewani	329,4	17,4	16,5	2,0	34,9	32,9	24,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	181,1	9,6	9,1	0,5	4,8	4,5	5,0	4,5
5.	Buah/Biji Berminyak	10,1	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	1,0	0,3
6.	Kacang-kacangan	97,0	5,1	4,9	2,0	10,3	9,7	10,0	9,7
7.	Gula	54,6	2,9	2,7	0,5	1,4	1,4	2,5	1,4
8.	Sayur dan Buah	94,2	5,0	4,7	5,0	24,9	23,5	30,0	23,5
9.	Lain-lain	15,7	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total		1889,2	100,0	94,5	11,5	105,9	100,0	100,0	89,2

Dari tabel diatas terlihat untuk Kota Banjarbaru skor PPH sebesar 89,2dengan konsumsi energi sebesar 1.889,2 (94,5 % AKE), hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat Kota Banjarbaru sudah semakin beragam dan berimbang. Konsumsi terbesar terletak pada konsumsi padi-padian sebesar 1083,9 kkal (seharusnya 1.000 kkal) hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kota banjarbaru masih didominasi oleh kebiasaan makan dan adat istiadat mereka, bahwa kalau belum makan nasi artinya belum makan. Hal ini bisa dilihat dari pola konsumsi kota banjarbaru di kelompok padi-padian.

Sementara itu pangan hewani konsumsinya juga berlebih. Pangan hewani masih didominasi oleh konsumsi ikan yang mencapai 329,4 kkal (seharusnya 240 kkal). Hal ini dikarenakan bahwa kebiasaan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat kota Banjarbaru yang senang makan ikan, dan seterusnya diikuti dengan konsumsi bahan lainnya. Skor tersebut didapat dari hasil analisa dan pengumpulan data konsumsi pangan yang dilakukan dengan cara survey dengan metode food record (pencatatan) yang diisi oleh masing-masing responden dalam rumah tangga di kelurahan pada 5 Kecamatan di Kota Banjarbaru. Responden mencatatsemua makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh setiap anggota rumah tangga, beserta Ukuran Rumah Tangga (URT) atau porsi makanan secara rinci, termasuk makanan dan minuman kemasan atau makanan jadi yang diberi atau dibeli di luar rumah.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel 9 diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indicator “Score PPH Konsumsi” Tahun 2018 adalah 89,20, namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 sebesar 91,2 baru tercapai 97,81 %

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang mendukung untuk sasaran Peningkatan Pola Konsumsi pangan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah:

1) Peningkatan Ketahanan Pangan

- a) Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
- b) Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan
- c) Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
- d) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
- e) Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif
- f) Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Landasan Ulin
- g) Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Banjarbaru
- h) Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Cempaka
- i) Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Liang Anggang
- j) Pendataan dan penyusunan Pola Konsumsi pangan
- k) Pendataan Jumlah penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan
- l) Ketersediaan Pangan Masyarakat
- m) Pengembangan Informasi dan Kemitraan Pelaku Usaha Pertanian

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Petani

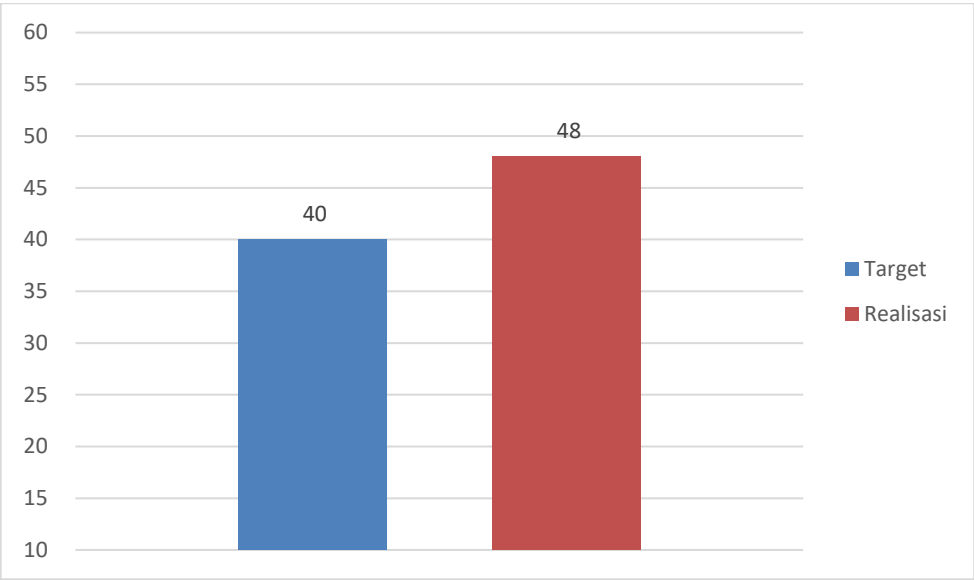
Sasaran tersebut menjadi sangat penting karena sumberdaya petani merupakan salah satu ujung tombak agar produktivitas pertanian dan perikanan meningkat demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, pangan dan perikanan. Untuk mengukur Sasaran ini digunakan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama seperti pada Tabel berikut :

Tabel. 11
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Petani

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Kinerja Tahun 2018	Prosentase Kinerja Tahun 2018 8= 7/6 x 100	Target Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Petani	Persentase Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	29	40	48	120 %	73

Indikator Kinerja Persentase Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan kapasitasnya di tahun 2018 ditargetkan sebesar 40%dan terealisasi 48% atau sebesar 120 %, dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**.

Diagram 5. Indikator Kinerja Persentase Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan Kapasitasnya



Tercapainya target sebesar 120% ini dari realisasi Tahun 2018 dimana target 230 kelompok tani kelas pemula yang ditargetkan naik kelas lanjut adalah 40 kelompok tani dan dapat terealisasi 49 kelompok tani yang naik kelas lanjut. Hasil ini juga tercapai dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pusat Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Pusat Kementerian Pertanian yaitu Peningkatan Kelembagaan Petani melalui kenaikan kelas kelompok dan peningkatan skor indikator kemampuan kelompok tani sehingga kelompok tani sebagai wadah organisasi formal yang mendukung peningkatan kelembagaan didukung penuh untuk maju.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir RPJMD

Berdasarkan Tabel 11 diatas, terlihat bahwa realisasi kinerja indicator “Persentase Kelembagaan Petani yang meningkat Kapasitasnya “ Tahun 2018 adalah 48%, namun jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2021 sebesar 73% baru tercapai 65,75 %

Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang mendukung untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Petani yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah:

- 1) **Peningkatan Kesejahteraan Petani**
 - a) Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluhan
 - b) Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan metode Informasi UPT Banjarbaru
 - c) Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan metode Informasi UPT Cempaka
 - d) Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan metode Informasi UPT Liang Anggang
 - e) Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan metode Informasi UPT Landasan Ulin
 - f) Peningkatan Kemampuan Lembaga Penyuluhan, Pendampingan Petani dan pelaku Agribisnis
- 2) **Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan**
 - a) Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

B. Realisasi Anggaran

Sebagai instansi pemerintah yang mengemban tugas melaksanakan pembangunan pangan, pertanian dan perikanan di wilayah Kota Banjarbaru, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan program kerja guna mewujudkan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru Tahun 2018.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru pada Tahun 2018 ini mendapat dukungan dana sebesar Rp. 15.408.761.605 yang terbagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dengan 2 (dua) sumber dana (APBD dan DAK) dengan rincian berikut ini :

Tabel. 12
Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru

No	Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.244.034.530	8.409.113.766
2	BELANJA LANGSUNG	6.505.777.554	6.010.820.506
	APBD	5.760.290.554	5.784.592.727
	DAK	745.487.000	562.335.000
	JUMLAH (1 + 2)	15. 749.812.084	13.205.384.809

Dari alokasi dan realisasi tersebut, terbagi dalam beberapa program dan kegiatan yang mencakup seluruh urusan, baik urusan semua SKPD, urusan Pangan, pertanian dan perikanan. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. URUSAN KETAHANAN PANGAN

Tabel. 13
Anggaran, Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan Pada Urusan
Wajib Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERSENTASE (%)	
		ALOKASI	REALISASI	SALDO	Keu	FISIK
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	460.216.230	450.597.630	9.618.600	97,91	100
1.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (DAK)	125.000.000	123.736.000	1.264.000	98,99	100
2.	Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Metode Informasi UPPT Banjarbaru	33.367.800	32.107.800	1.260.000	96,22	100
3.	Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Metode Informasi UPPT Cempaka	31.306.600	31.306.000	600	100,00	100
4.	Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Metode Informasi UPPT Liang Anggang	34.355.800	33.387.800	968.000	97,18	100
5.	Peningkatan Kualitas SDM dan Penerapan Metode Informasi UPPT Landasan Ulin	31.066.800	31.066.800	0	100,00	100
6.	Peningkatan Kemampuan Lembaga Penyuluhan, Pendampingan Petani, dan Pelaku Agribisnis	205.119.230	198.993.230	6.126.000	97,01	100
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	745.027.360	737.916.390	7.110.970	99,05	100
7.	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	29.978.200	29.978.200	0	100,00	100
8.	emanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	145.560.000	141.120.000	4.440.000	96,95	100
9.	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	35.852.600	34.727.600	1.125.000	96,86	100
10.	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	52.749.770	52.586.400	163.370	99,69	100
11.	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	133.898.090	132.848.090	1.050.000	99,22	100
12.	Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Landasan Ulin	23.497.000	23.497.000	0	100,00	100
13.	Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Banjarbaru	24.603.100	24.603.100	0	100,00	100
14.	Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Cempaka	15.863.000	15.863.000	0	100,00	100
15.	Pemanfaatan Pekarangan UPT BPP Liang Anggang	26.850.000	26.850.000	0	100,00	100
16.	Pendataan dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan	52.440.000	52.440.000	0	100,00	100

17.	Pendataan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	15.122.800	15.122.000	800	99,99	100
18.	Ketersediaan Pangan Masyarakat	140.700.800	140.369.000	331.800	99,76	100
19	Pengembangan Informasi dan Kemitraan Pelaku Usaha Pertanian	47.912.000	47.912.000	0	100,00	100
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	163.031.000	135.012.000	28.019.000	82,81	100
20.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	163.031.000	135.012.000	28.019.000	82,81	100
	JUMLAH	2.736.549.180	2.647.052.040	89.497.140	97,58	100

Pada urusan Ketahanan Pangan ini, hampir seluruh kegiatan realisasi keuangannyadiatas 90 %, bahkan ada yang realisasi keuangannya 100 %, hanya ada satu kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 90 %, hal ini karena adanya sisa kegiatan dari uang perjalanan dinas yang sudah dilaksanakan. Walaupun realisasi keuangannya tidak seluruhnya 100 % akan tetapi realisasi fisiknya semuanya 100 %, hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran pada urusan ketahanan pangan.

2. URUSAN PERTANIAN

Tabel. 14
 Anggaran, Realisasi Fisik dan Keuangan Pada Urusan Pertanian

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERSENTASE (%)	
		ALOKASI	REALISASI	SALDO	ANGGARAN	FISIK
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1.455.590.200	1.212.567.200	243.023.000	83,30	94,28
1.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	8.526.000	8.526.000	0	100,00	100
2.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK)	620.487.000	560.487.000	60.000.000	90,33	100
3.	Pengembangan Upaya Khusus Padi,Jagung dan Kedelai	143.484.000	132.944.000	10.540.000	92,65	100
4.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Holtikultura	168.237.500	157.746.500	10.491.000	93,76	100
5.	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Holtikultura	319.612.000	161.620.000	157.992.000	50,57	60
6.	Pengembangan Benih/Bibit Unggul Holtikultura	82.629.700	82.399.700	230.000	99,72	100
7.	Pengembangan Usaha Perkebunan	112.614.000	108.844.000	3.770.000	96,65	100
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	144.156.400	136.176.700	7.979.700	94,46	100
8.	Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner	26.760.000	26.342.500	417.500	98,44	100
9.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis	40.559.200	39.875.200	684.000	98,31	100
10.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	37.005.200	35.693.000	1.312.200	96,45	100

	Ternak Masyarakat					
11.	Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Kesehatan Ternak Milik Masyarakat	39.832.000	34.266.000	5.566.000	86,03	100
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	640.641.800	637.272.800	3.369.000	99,47	100
12.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak	130.000.000	129.350.000	650.000	99,50	100
13.	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	149.500.000	148.054.000	1.446.000	99,03	100
14.	Pengembangan Agribisnis Peternakan	99.336.800	99.316.800	20.000	99,98	100
15.	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Melalui Pembibitan dan Penetasan	261.805.000	260.552.000	1.253.000	99,52	100
	JUMLAH	4.480.776.800	3.972.033.400	508.743.400	93,23	97,14

Pada table diatas terlihat hampir seluruh kegiatan realisasi keuangannya diatas 90 %, hanya ada satu kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 60 % (50,57 %) , hal ini karena adanya satu sub kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan (pengadaan bibit durian)karena petani nya belum sepenuhnya dapat menyediakan lahan untuk bibit tersebut, sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Untuk capaian realisasi fisiknya sebesar 97,14%.

3. URUSAN PERIKANAN

Tabel. 15
Anggaran, Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan Pada Urusan Perikanan
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PERSENTASE (%)	
		ALOKASI	REALISASI	SALDO	ANGGARAN	FISIK
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	488.812.400	485.967.400	2.845.000	99,42	100
1.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan	299.200.000	297.317.500	1.882.500	99,37	100
2.	Pembinaan dan Pengawasan Kelestarian Sumber Daya Perikanan	25.021.000	24.908.500	112.500	99,55	100
3.	Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar	164.591.400,00	163.741.400,00	850.000,00	99,48	100
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	174.961.864,00	160.241.864,00	14.720.000,00	91,59	87,50
4.	Peningkatan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	135.768.000,00	135.328.000,00	440.000,00	99,68	100
5.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Benih Ikan	39.193.864,00	24.913.864,00	14.280.000,00	63,57	75
	JUMLAH	1.327.548.528	1.292.418.528	35.130.000	93,24	93,75

Realisasi keuangan pada urusan perikanan program Pengembangan Budidaya Perikanan sebesar 99,42%. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan realisasi keuangan sebesar 91,59%. Jumlah keseluruhan anggaran keuangan Urusan Perikanan dapat terealisasi

sebesar 93,24%. Realisasi fisik pada urusan perikanan program Pengembangan Budidaya Perikanan sebesar 100%. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan realisasi fisik sebesar 87,50%. Pada Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar Benih Ikan realisasi fisik dan keuangan tidak tercapai 100%, karena ada sub kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Jumlah keseluruhan realisasi fisik Urusan perikanan adalah sebesar 93,75%.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 22 tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru nomenklatur jabatan pelaksana sebanyak 51 jabatan pelaksana. Sedangkan berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK), nomenklatur jabatan pelaksana yang harus ada pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah sebanyak 72 jabatan pelaksana. Mencermati dan memperhatikan hal tersebut terhadap sumberdaya aparatur yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, maka dapat dikemukakan bahwa dalam sisi jumlah kompetensi jabatan pelaksana yang dimiliki khususnya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan masih dirasakan kurang, karena selain banyak bidang yang ditangani Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan juga mempunyai 7 (tujuh) UPT yang tersebar di seluruh Kecamatan Kota Banjarbaru.

Walaupun demikian, dengan memaksimalkan SDM yang terampil dan terlatih di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru sehingga semua program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga capaian target dapat terealisasi dengan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

BAB IV PENUTUP

B. Kesimpulan

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru kurun waktu satu tahun, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut terutama mengacu kepada Rencana Kerja Tahun 2018 yang dibuat pada awal tahun. Pada dasarnya hampir semua kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana baik yang bersifat teknis maupun pembinaan.

Selama pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari realisasi capaian yang rata-rata diatas 100%, ini berarti secara garis besar kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dapat dilaksanakan sesuai target dan selesai pada waktunya.

Masih terdapatnya beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan, dimana terlihat pencapaian realisasi fisik dan keuangan yang kurang dari 100 %, namun tidak terlalu berpengaruh terhadap pencapaian kinerja.

C. Saran Tindak Lanjut

Bercermin dari capaian kinerja evaluasi nilai akhir kinerja organisasi tahun 2018, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru dalam rangka mengemban misi dan mewujudkan visinya, maka beberapa isu strategis yang masih perlu mendapat perhatian serius adalah:

1. Penyusunan program pengembangan pangan, pertanian dan perikanan yang logis, aspiratif, dan sesuai kebutuhan;
2. Mendorong keterlibatan stakeholder dalam pengembangan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Banjarbaru, mengingat investor yang bergerak dalam bidang pangan, pertanian dan perikanan relatif masih rendah;
3. Menyusun dan menyebarluaskan data dan informasi potensi pertanian dan perikanan Kota Banjarbaru kepada pihak yang berkompeten, mengingat data

dan informasi potensi sumber daya alam (SDA) pangan, pertanian dan perikanan belum dimanfaatkan optimal;

4. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana dalam usaha pengembangan pangan, pertanian dan perikanan di Kota Banjarbaru, mengingat sarana dan prasarana pendukung kegiatan masih terbatas;
5. Meningkatkan pelayanan aparatur melalui efisiensi dan efektivitas kegiatan yang mengandalkan teknologi ramah lingkungan.
6. Alokasi dana untuk ketahanan pangan, pertanian dan perikanan dapat lebih ditingkatkan;
7. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani Kota Banjarbaru baik melalui kelompok tani ataupun secara mandiri;
8. Penguatan permodalan petani dalam pengembangan pangan, pertanian dan perikanan;
9. Mendorong pengolahan hasil komoditi pertanian, peternakan dan perikanan dengan memanfaatkan bahan baku dari luar kota, mengingat sumber daya alam (SDA) pertanian dan perikanan Kota Banjarbaru terbatas.

